



Peran Perpustakaan dalam Pengentasan Kemiskinan Informasi di Perguruan Tinggi

Husnah

UIN Imam Bonjol Padang
ramlihusnah@gmail.com

Received: 19 Oktober 2023

Accepted: 15 Desember 2023

Published: 15 Desember 2023

ABSTRACT- *At this level, information is seen as having strategic value to move various aspects of people's lives. Humankind's dependence on information will influence the role of information itself in society. Information is starting to be seen as one of human needs, even though it is not yet a primary need. That's when the concept of the information society began to emerge. In this research the author used descriptive methods and literature study. The descriptive method is a method that aims to provide an accurate picture of the status or characteristics of an ongoing situation or phenomenon. Research is the process of systematically collecting and interpreting information. While library research refers to the systematic collection and interpretation of material written by others, empirical research refers to systematic observation to gather new information. It is very strategic that university libraries and other types of libraries aimed at the public in the public sphere need to receive attention and at the same time be directed at supporting the alleviation of information poverty. To be able to guarantee this, it is necessary to strengthen the institution of university libraries as democratic public institutions in serving the information needs of the community. Eradicating information poverty has two objectives, firstly as an effort to provide information and empower the community in accessing information through libraries, secondly as an effort to make people's lives more intelligent through providing information according to their needs. Information poverty alleviation programs are needed by the community in the current situation.*

Keywords: *Information Poverty, Poverty Alleviation, College Library*

ABSTRAK- *Pada tataran ini informasi dipandang mempunyai nilai strategis untuk menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. ketergantungan umat manusia terhadap informasi akan berpengaruh terhadap peran informasi itu sendiri di dalam masyarakat. informasi mulai dipandang sebagai salah satu kebutuhan manusia walaupun belum merupakan kebutuhan primer. Saat itulah konsep masyarakat informasi mulai muncul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan studi pustaka. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat tentang status atau karakteristik suatu situasi atau fenomena sedang berlangsung. Penelitian adalah proses pengumpulan dan interpretasi informasi secara sistematis. Sedangkan penelitian perpustakaan mengacu pada pengumpulan dan interpretasi sistematis dari bahan yang ditulis orang lain, penelitian empiris mengacu pada pengamatan sistematis untuk mengumpulkan informasi baru. Sangat strategis apabila perpustakaan perguruan tinggi dan jenis perpustakaan lainnya yang ditujukan untuk public merupakan public sphere perlu mendapat perhatian dan sekaligus diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan informasi. Untuk bisa menjamin hal tersebut diperlukan penguatan kelembagaan perpustakaan perguruan tinggi sebagai institusi publik yang demokratis dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Pengentasan kemiskinan informasi mempunyai dua tujuan*

pertama sebagai upaya penyediaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan akses informasi melalui perpustakaan, kedua merupakan upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Program pengentasan kemiskinan informasi dibutuhkan masyarakat dalam situasi sekarang ini.

Kata Kunci: Kemiskinan Informasi, Pengentasan Kemiskinan, Perpustakaan perguruan tinggi

A. PENDAHULUAN

1. Masyarakat Informasi

Saat ini informasi telah menjadi kebutuhan hampir semua umat manusia. Mulai masyarakat perkotaan sampai dengan masyarakat perdesaan membutuhkan informasi sesuai dengan kepentingannya. Ada untuk sekedar mencari hiburan untuk menunjang kehidupannya. Informasi sebagai penunjang kehidupan sangat diperlukan agar pemakai dapat memperoleh nilai tambah tertentu guna menunjang kehidupannya. Untuk memperoleh informasi tercetak berbagai macam ragam mulai dari membeli di pinggir jalanan, di kios, dan di toko-toko buku, dan sebagainya.

Secara umum batasan pengertian informasi dalam pokok bahasan ini adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat didokumentasikan, fakta-fakta, data-data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan sesuatu dengan sendirinya atau melalui bentuk dokumen

baik tercetak maupun terekam. Informasi yang demikian diharapkan dan merupakan *consumption good* dan tentunya harus memiliki nilai tambah dan member keuntungan bagi setiap pemakainnya.

Dalam kehidupan modern sejak decade 1950-an negara-negara Eropa, Amerika dan beberapa negara Asia seperti Singapura dan Jepang, negara-negara tersebut telah memberikan perhatian terhadap pemenuhan informasi bagi rakyatnya melalui berbagai saluran informasi termasuk dalam hal ini perpustakaan umum. Pada tataran ini informasi dipandang mempunyai nilai strategis untuk menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketergantungan umat manusia terhadap informasi akan berpengaruh terhadap peran informasi itu sendiri di dalam masyarakat. Informasi mulai dipandang sebagai salah satu kebutuhan manusia walaupun belum merupakan kebutuhan primer. Saat itulah konsep masyarakat informasi mulai muncul.

2. Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi

Perpustakaan adalah sebagai sumber daya informasi yang menjadi tulang punggung gerak institusi terutama institusi pendidikan. Perpustakaan seperti sebuah permata yang hilang dan telah ditemukan dulu perpustakaan telah ada bahkan jika ada sekolah di situ ada perpustakaan. Akan tetapi perpustakaan dulu hanya sebagai tempat buku saja, bahkan hanya sebagai pelengkap dunia pendidikan.

Sekarang ini perpustakaan tidak lagi sebagai penyimpan buku semata tetapi menjadi tempat pengguna maupun menciptakan sesuatu yang mampu di baca dan digunakan orang lain. Konsekuensi untuk selalu berkembang itu adalah tuntutan bagi perpustakaan untuk selalu berkembang mengikutinya dengan berupaya memberikan layanan terbaik bagi pengguna. Perkembangan yang tampak saat ini adalah mulai di adakan perpustakaan digital. Di dalam perpustakaan digital ini, koleksi yang dimiliki berupa informasi yang terekam dalam bentuk digital, dan aksesnya pun perlu media yang bernama computer atau hp.

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat informasi, baik yang berkaitan dengan social, politik, budaya, ekonomi dan informasi lainnya. Diperguruan tinggi perpustakaan sering di istilahkan sebagai “ jantungnya perguruan tinggi”. Hal ini berarti perpustakaan memiliki peranan penting di dunia pendidikan. Jika jantungnya lemah, tubuh yang lainnya juga akan menjadi lemah. Ini artinya jika perpustakaan lemah maka akan berpengaruh terhadap institusi tempat perpustakaan bernaung, sebaliknya jika jantungnya baik akan membuat baik pula institusinya.

Peran perpustakaan saat ini dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan layanan informasi yang di butuhkan penggunanya. Dalam memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan harus mengacu kepada efisiensi dan efektifitas waktu. Sehingga pengguna merasa terpuaskan dengan layanan yang ada. Oleh sebab itu perpustakaan harus senantiasa melakukan pengembangan terhadap komponen perpustakaan perguruan tinggi. Ketika perpustakaan senantiasa melakukan pengembangan terhadap komponen yang dimiliki, maka

perpustakaan akan menjadi rujukan pertama bagi masyarakat ketika membutuhkan sebuah informasi. Selain itu perpustakaan akan memerankan peranannya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dari perpustakaan itu sendiri dan kecerdasan masyarakat bukan hal yang tidak mungkin lagi untuk di wujudkan.

3. Tujuan Pengentasan Kemiskinan Informasi

Secara umum program pengentasan kemiskinan informasi mempunyai tujuan yaitu :

1. Sebagai upaya penyediaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan akses informasi melalui perpustakaan.
2. Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Merupakan suatu catatan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum ada ukuran baku tentang kebutuhan informasi minimal sebagai ambang batas untuk mengukur kemiskinan informasi. Pokok bahasan ini mencoba mengidentifikasi tentang kemiskinan informasi dan peran perpustakaan dalam pengentasan kemiskinan informasi

sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai perubahan inovasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Woro tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan kemudahan akses bahan pustaka dan sumber informasi bermutu untuk masyarakat.
- b. Masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan untuk berbagi pengalaman dan melatih keterampilan agar peroleh keahlian & pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c. Perpustakaan menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan di daerah, agar manfaat dan dampak perpustakaan di masyarakat lebih optimal.

Dapat dipahami tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat

peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

1. Definisi Kemiskinan Informasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002) pengertian miskin adalah tidak berharta, serba kekurangan karena berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam konteks pengertian tersebut kemiskinan diasosiasikan dalam keadaan serba memprihatikan, serba kekurangan dari ukuran hidup yang layak. Kata miskin selalu diasosiasikan pada kondisi serba kekurangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi walaupun indikator kemiskinan informasi belum begitu jelas tetapi kesenjangan tersebut ada dan dapat dirasakan.

Para pakar mengatakan informasi adalah kekuatan, penguasaan terhadap informasi merupakan daya dorong untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak semua masyarakat bisa memperoleh

kesempatan akses informasi yang di butuhkan. Kesempatan masyarakat apalagi masyarakat perdesaan untuk memperoleh informasi tercetak seperti surat kabar, majalah, selebaran, *booklet* maupun buku masih sangat terbatas kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan informasi, termasuk disini informasi fungsional. Pengertian informasi fungsional adalah informasi yang mempunyai potensi mempengaruhi pikiran dan perilaku pemakainya untuk memperbaiki atau merubah taraf kehidupan seseorang.

2. Faktor Kemiskinan

Menurut Himayah (2013: 17-19), Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan informasi :

1. Faktor Akses Informasi

Penyebab utamanya adalah kurang atau tidak adanya akses pada informasi yang penting, dan jika walaupun akses itu tersedia, terjadi ketidak mampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Menurut data World Bank (1998: 21), secara khusus hal ini adalah penyebab utama kemiskinan informasi. Bukan hanya tidak adanya pengetahuan yang berkaitan dengan proses pencarian informasi, tapi juga ketidak mampuan untuk menentukan nilai produk dan

layanan informasi tersebut. Diperlukan keahlian untuk menguasai teknologi yang menyediakan akses kepada informasi. Pada banyak kasus di negara berkembang pada umumnya orang mampu mengakses dan menggunakan media tradisional, seperti media cetak, tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

2. Faktor Sosial Ekonomi dan Infrastruktur Informasi

Faktor ekonomi sosial dan infrastruktur informasi merupakan salah satu dari faktor kemiskinan informasi. Diketahui bahwa produk dan layanan informasi yang dianggap milik semua orang dikomersialkan dengan adanya hak intelektual, hal ini menjadikan informasi tidak gratis, atau harus dibayar jika ingin mendapatkannya. Padahal tidak semua kelompok individu atau populasi memiliki ekonomi yang memadai untuk membeli informasi yang dibutuhkan, hal ini disebut faktor ekonomi sosial. Sedangkan infrastruktur informasi merupakan badan yang menyebarkan informasi atau produsen informasi, mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media masa dan jaringan elektronik seperti

internet, aplikasi, dan kebijakan pemerintah di bidang informasi. Faktor sosial ekonomi terutama muncul sebagai akibat dari globalisasi dan integrasi pada kehidupan sosial ekonomi secara global, yang disebabkan oleh kapitalisme yang mengarahkan kepada ekonomi berbasis informasi. Hal itu juga menimbulkan munculnya jaringan ekonomi dan sosial yang dengan ciri globalisasi komunikasi, pembangunan infrastruktur informasi dan globalisasi tenaga kerja, produksi dan keuangan. Distribusi produk dan layanan informasi dan perangkat keras dan lunak sebagai pendukung sektor informasi menjadi sektor andalan pada beberapa negara kaya. Selain dampak positif di atas, globalisasi juga mengakibatkan terjadinya kemiskinan informasi. Beberapa produk dan layanan informasi yang tadinya dianggap milik semua orang menjadi dikomersialisasi dengan adanya hukum hak intelektual, sehingga informasi bisa menjadi „mata uang“. Misalnya informasi yang berkaitan dengan bidang medis, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga. Dalam hal infrastruktur informasi, tulang punggung negara-negara yang kaya informasi adalah infrastruktur informasi yang baik, yang

memudahkan komunikasi informasi. Infrastruktur itu mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media massa dan jaringan elektronik seperti internet, dan formulasi serta aplikasi kebijakan di bidang informasi. Kebanyakan negara sedang berkembang tidak mempunyai infrastruktur informasi yang canggih seperti itu, yang mengakibatkan ketidak mampuan negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam globalisasi informasi dan pertukaran pengetahuan.

3. Faktor Konteks Informasi Setiap Individu

Konteks informasi setiap individu adalah penalaran konteks dari pesan dan simbol yang ditemui seseorang dalam percakapan dan interaksi melalui media informasi. Implikasinya adalah, dua orang yang berbeda, berada dalam lingkungan yang sama, mempunyai interpretasi yang berbeda tentang sebuah informasi yang sama karena bergantung pada pengalaman dan pengetahuan (konteks informasi). Hal ini juga mengakibatkan bahwa seseorang dapat dianggap kaya informasi dan dapat menerapkan makna informasi dengan tepat. Sedangkan orang lain pada konteks atau situasi yang sama mungkin

miskin informasi karena ketidak mampuan untuk memahami makna informasi pada konteks yang sama tersebut.

C. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan studi pustaka. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat tentang status atau karakteristik suatu situasi atau fenomena sedang berlangsung. Penelitian adalah proses pengumpulan dan interpretasi informasi secara sistematis. Sedangkan penelitian kepustakaan mengacu pada pengumpulan dan interpretasi sistematis dari bahan yang ditulis orang lain, penelitian empiris mengacu pada pengamatan sistematis untuk mengumpulkan informasi baru.

Informasi yang dibutuhkan pada penelitian empiris disebut data yang di analisis untuk membantu dalam membuat interpretasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan sebagai sumber informasi dapat membantu pengentasan kemiskinan informasi. Diharapkan

perpustakaan terutama perpustakaan umum mampu berperan sebagai simpul informasi bagi masyarakat dalam menyediakan akses informasi secara memadai dan murah. Untuk itu perpustakaan perlu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dan berpihak kepada kebutuhan informasi masyarakat. demokratis dalam arti bahwa perpustakaan diselenggarakan untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang berbagai perbedaan seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, status sosial, kepercayaan dan warna kulit seta berkeadilan artinya bahwa semua masyarakat perlu mendapat hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan baik dipertanian maupun di perguruan tinggi.

Jika hal ini dapat dilaksanakan akan menjadikan perpustakaan bukan saja merupakan sumber informasi bagi masyarakat akan tetapi juga merupakan identitas komunitas di dalam masyarakat tersebut, Perpustakaan merupakan suatu tempat untuk mencari arah dan merupakan suatu bagian dari komunitas masyarakat itu.

Memang tidak mudah untuk mewujudkan kondisi seperti itu, akan tetapi paling tidak kita harus

memulainya. Mengkondisikan kehidupan masyarakat berbasis pada informasi melalui penyediaan informasi di berbagai perpustakaan dan dilingkungan kehidupan, harus ada program yang jelas, terarah dan sekaligus terukur, Diperlukan kerja keras dan bersnergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya.

Sangat strategis apabila perpustakaan perguruan tinggi dan jenis perpustakaan lainnya yang ditujukan untuk public merupakan public sphere perlu mendapat perhatian dan sekaligus diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan informasi. Untuk bisa menjamin hal tersebut diperlukan penguatan kelembagaan perpustakaan perguruan tinggi sebagai institusi publik yang demokratis dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Pada kondisi seperti itu perpustakaan bisa dipandang sebagai "lembaga pendidikan non formal" yang bisa berperan untuk menunjang pendidikan sepanjang hayat, Untuk itu perpustakaan harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sebenarnya perpustakaan juga bisa berperan sebagai agen perubahan walaupun itu hanya

terbatas bagi penggunaannya (SulistyoBasuki, 2001).

Bahwa perpustakaan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat hal ini sejalan dengan prinsip Manifesto UNESCO untuk perpustakaan umum (Unesco, 1991) maka selayaknya bahwa perpustakaan umum perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan. Selain itu berebagai jenis perpustakaan yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan untuk menujung pengentasan kemiskinan informasi. Perpustakaan yang dipandang strategis untuk tugas ini adalah : Perpustakaan Nasional RI, Badan Perpustakaan Propinsi (Perpustakaan Propinsi), Perpustakaan Umum Kota dan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kecamatan, dan Perpustakaan Keliling. Jenis perpustakaan ini dipandang strategis karena layanannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perpustakaan lain seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus lain yang dipandang strategis dalam rangka upaya perpustakaan untuk pengentasan kemiskinan informasi. Sebenarnya program pengentasan kemiskinan informasi sekaligus juga

merupakan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Program yang bisa dilakukan oleh perpustakaan dalam mendukung pengentasan kemiskinan informasi adalah :

- a. Pencanaan program pengentasan kemiskinan informasi menjadi salah satu program Perpustakaan Nasional RI yang dapat dilaksanakan oleh perpustakaan propinsi, perpustakaan umum kota dan kabupaten, perpustakaan desa/kecamatan serta perpustakaan keliling.
- b. Menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya untuk informasi dengan memperhatikan kondisi social dan kemampuan daya serap masyarakat terhadap informasi.
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Diknas, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Kota maupun Kabupaten mewujudkan di dalam masyarakat program pengentasan kemiskinan informasi masyarakat.
- d. Melakukan promosi dan penyuluhan tentang pentingnya informasi bagi masyarakat melalui saluranyang strategis yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat

seperti PKK, Karang taruna, Majelis Taklim, serta kelompok-kelompok.

- e. Perlunya diciptakan penguatan kelembagaan perpustakaan untuk menunjang program pengentasan kemiskinan informasi masyarakat.

Pemanfaatan Layanan Informasi Perpustakaan

Berbagai program untuk membedah gairah pemanfaatan informasi khususnya informasi tercetak telah banyak dicanangkan di Indonesia. Mulai dari hari aksara, bulan buku nasional, gerakan wakaf buku, hari kunjungan perpustakaan, bulan gemar membaca, program menumbuhkan gemar membaca seperti didirikannya Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca (PMGM) dan Gerakan Membaca Nasional (GMN) yang dicanangkan oleh Presiden Megawati pada tahun 2003. Gerakan membaca pada dasarnya adalah upaya-upaya pemanfaatan informasi. Sasaran dari gerakan ini adalah semua lapisan masyarakat termasuk remaja dan anak-anak yang saat ini merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sasaran tersebut tidaklah keliru, tetapi untuk pengentasan kemiskinan, berbagai program tersebut dapat berimbas pada pengentasan kemiskinan informasi masyarakat. Program bulan buku dan minat baca

yang telah dicanangkan berkali-kali belum diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mampu mendorong berjalannya program tersebut. Adapun program tersebut adalah :

- a. Membentuk Badan Pengembangan Budaya Nasional (BPBN)
- b. Melaksanakan promosi gerakan membaca nasional di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
- c. Memberdayakan seluruh potensi berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang keberhasilan gerakan membaca nasional.
- d. Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta kemasyarakatan dalam mengembangkan budaya baca.
- e. Melaksanakan sistem jaringan informasi pengembangan budaya baca nasional.
- f. Mendorong pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan dan menyebarluaskan sarana bacaan sampai ke pedesaan.
- g. Menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok yang kesepuluh.
- h. Mendorong dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk belajar seumur hidup melalui gerakan membaca nasional.

- i. Melaksanakan hubungan kerja sama gerakan membaca nasional dengan berbagai negara di kawasan regional dan Internasional.

Untuk itu diharapkan pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaannya melalui simbol-simbol informasi yang strategis di perpustakaan perguruan tinggi. Meningkatkan minat pemanfaatan informasi melalui penyediaan informasi khususnya informasi fungsional kepada masyarakat ibara memberikan kail dan bukan memberiak ikan. Dengan cara itu secara tidak langsung masyarakat dididik untuk bisa memanfaatkan informasi yang sesauai dengan kebutuhan hidupnya . Disini ada “makna proses pendidikan” yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi melalui penyediaan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. SIMPULAN

Dari ulasan di atas mengenai kasus yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia jelas terlihat bahwa ketersediaan formasi mendesak untuk di adakan agar mereka mampu berdiri sendiri. Hak memperoleh informasi

merupakan hak bagi setiap kelompok warga negara bahkan masyarakat terpencil sekalipun.

Penguasaan terhadap informasi merupakan daya dorong untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak semua masyarakat bisa memperoleh kesempatan akses informasi yang dibutuhkan, Kesempatan masyarakat apalagi masyarakat pedesaan untuk memperoleh informasi tercetak seperti surat kabar, majalah, selebaran mautehlah melumpuhkanpun buku masih sangat terbatas, kondisi ini menyebabkan terjadi kemiskinan informasi, termasuk disini adalah informasi fungsional yang mempunyai potensi mempengaruhi pikiran dan prilaku pemakainya untuk memperbaiki atau merubah taraf kehidupan seseorang. Kemiskinan informasi merupakan fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat, Pengentasan kemiskinan informasi mempunyai dua tujuan pertama sebagai uipaya penyediaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan akses informasi melalui perpustakaan , kedua merupakan upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat

melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Program pengentasan kemiskinan informasi dibutuhkan masyarakat dalam situasi sekarang ini, Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah melumpuhkan ekonomi masyarakat. kesiapan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi rakyat juga dipengaruhi oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Peran perpustakaan terutama perpustakaan umum perlu lebih dikedepankan dalam rangka menunjang pengentasan kemiskinan informasi, perpustakaan umum diharapkan bisa memberikan layanan informasi fungsional yang tepat guna secara demokratis dan berkeadilan sebagaimana amanat UUD 1945 khususnya fasal 28 butir F. Sudah waktunya perpustakaan Nasional RI mengangkat isu pengentasan kemiskinan informasi sebagai program nasional. Peran perpustakaan dalam hal ini sangat strategis dalam membantu pengentasan kemiskinan informasi, khususnya peran perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan lain yang melani public seperti perpustakaan Propinsi (Badan Perpustakaan), Perpustakaan umum perpustakaan Kota/Kabupaten,

perpustakaan Desa/Kecamatan serta perpustakaan Keliling, sebab perpustakaan Nasional RI mengayomi perpustakaan yang ada diseluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. "Peranan Perpustakaan Keliling Dalam Mengentaskan Kemiskinan Informasi Di Pedesaan.
- A World Bank Policy Research Report. (1998). World Bank: Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why. Oxford: Oxford University Press.
- Depdikbud.(2002) Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta : Balai Pustaka.
- Himayah. 2013. Katalogisasi Koleksi Perpustakaan dan Informasi: Berdasarkan AACR2,ISBD dan RDA. Makassar: Alauddin University Press.
- Ritonga, Harmonangan, 2004. "Mengapa Kemiskinan Di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan *Kompas* 10 Februari.
- Sulistyo Basuki, (2001). Potensi Perpustakaan dalam Menghadapi Krisis Sosial .Jakarta : Gramedia.

Sutarno, (2006). Perpustakaan dan Masyarakat, Ed. Revisi. Jakarta: Sagung Seto.

Wilhelm, Anthony G. (2003) Demokrasi di Era Digital Tantangan Kehidupan di Ruang Cyber, Penyunting dan pengantar Heru Nugroho, Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan Centre for Critical Social Studies (CCSS).